



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: RADAR TARAKAN

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
V																														

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
			V								

TAHUN
2015

HALAMAN
3a



LAPORAN
KEUANGAN: Pj
Gubernur Kaltara
H. Irianto Lambrie
menyerahkan LKPD
Provinsi Kaltara ke-
pada Kepala BPK RI
Perwakilan Kaltara
Ade Iwan Rusmana
di Tarakan kemarin
(31/3). Dalam ke-
sempatan itu Irianto
mengungkapkan
tekad Pemprov
Kaltara untuk meraih
Wajar Tanpa
Pengecualian.

HUMAS UNTUK RADAR TARAKAN

Komitmen Raih WTP

Pj Gubernur Serahkan LKPD Kepada BPK

TARAKAN - Penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. H. Irianto Lambrie menyerahkan Laporan Hasil Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara, Selasa (31/3). LKPD langsung diserahkan kepada Kepala Perwakilan BPK Kaltara Ade Iwan Ruswana.

Irianto menjelaskan penyerahan LKPD ini merupakan bentuk transparansi dan tekad Pemprov Kaltara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sebab Pemprov Kaltara memiliki tekad dan komitmen agar tata kelola keuangan yang dilaksanakan bisa mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pihaknya, lanjut Irianto berupaya dan memiliki komitmen. Agar proses pengelolaan keuangan negara bisa berjalan transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, lanjut Irianto pihaknya terus berupaya melakukan pencatatan terhadap berbagai aset yang akan diserahkan atau dihibahkan dari Provinsi Induk Kaltim dan Kabupaten/Kota se-Kaltara. Saat ini sedang dalam proses pendataan berbagai aset agar dilengkapi dokumen yang

diperlukan sebelum dilakukan proses serah terima.

"Menjadi harapan kita bersama untuk bisa meraih penghargaan tertinggi dalam mengelola keuangan yakni WTP. Bahkan peluang untuk meraih WTP bagi Pemprov Kaltara ada," jelas Irianto.

Peluang Kaltara untuk meraih WTP sangat terbuka dikarenakan kompleksitas keuangan yang ada belum seperti provinsi yang sudah lama. Tinggal keputusan dari tim pemeriksa. Apalagi aset Provinsi Kaltara belum terlalu banyak, seperti kendaraan yang sifatnya bergerak.

"Untuk keuangan sendiri sudah sangat kompleks, tahun ini saja anggaran kisaran Rp 1 triliun lebih," jelasnya.

Selain itu, tambah Irianto, Kaltara telah banyak belajar dan

melakukan kerja sama dengan BPKP secara periodik. Kaltara telah melakukan bimbingan teknis dengan menggunakan tenaga dari BPKP Provinsi Kaltara. Saat ini Kaltara telah mempunyai tenaga akuntan, yang merupakan pindahan dari BPKP. Saat ini penempatan posisi tenaga tersebut sebagai Ke-

pala Bagian (Kabag) Akutansi Biro Keuangan.

"Laporan keuangan Kaltara telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. Kami akan memperbaiki bila terdapat kekurangan, baik pada tahun yang diperiksa maupun tahun mendatang. Semoga audit BPK memberikan hasil yang terbaik," kata Irianto.

Irianto mengatakan, dalam penyampaian LKPD, sebenarnya Pemprov Kaltara sudah bisa menyerahkan tepat waktu. Akan tetapi, masih menyusulkan jadwal yang telah ditentukan. Sebab sesuai ketentuan diatur Pemda wajib menyerahkan laporan keuangan kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Dan hari ini (kemarin) merupakan hari terakhir menyampaikan LKPD kepada BPK," katanya. Menurutnya, dalam menyusun laporan keuangan daerah memang tidak mudah. Dan pihaknya terus melakukan pembenahan dengan mengikuti petunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku. Selain itu pihaknya juga selalu belajar dari pengalaman daerah lain yang sudah cukup lama melakukan hal ini.

"Tarakan merupakan satu-satunya peraih penghargaan WTP semoga Kaltara dan Bulungan bisa menyusul. Kaltara memang belum terlalu banyak aset yang dimiliki, tetapi pada prinsipnya Kaltara ingin lebih baik," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Ade Iwan Rusmana mengatakan pemerintah daerah di wilayah Kaltara diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tahun depan opini atas LKPD dapat ditingkatkan, lebih efektif, dan efisien. Selain itu diharapkan terjadinya sinergitas antara eksekutif dan legislatif agar tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah termasuk pengawasannya dapat berjalan maksimal.

"Saya berharap pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah di Kaltara tiap tahun mengalami peningkatan sehingga lebih baik, yang pada akhirnya bisa meraih penghargaan WTP," ujarnya. (hmsprov)